

ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM PENCAPAIAN EFEKTIVITAS DANA PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM) DI KECAMATAN RANTAU SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU

Irwadana Juliandri Nadeak

Kantor Kelurahan Aek Kota Batu, Jl. Protokol No. 114 Aek Kota Batu Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhanbatu – Sumatera Utara.

Analysis of Direct Cash Grant (BLT) Management in Achieving the Fund Effectiveness of Fuel Subsidy Reduction Compensation Program (PKPS BBM) at Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu District

The research aims at analyzing the Direct Cash Grant (BLT) Management in Achieving the Fund Effectiveness of Fuel Subsidy Reduction Compensation Program (PKPS BBM) at Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu District. The research variables comprise two variables. The first variable is the Direct Cash Grant Management consisting of sub-variables: planning, organizing and controlling. The indicators are data collection, socialization, distribution and control. The second variable is Fund Effectiveness of Fuel Subsidy Reduction Compensation Program (PKPS BBM) with the indicators: right target, timeliness, and advantages.

The research result shows that the Direct Cash Grant (BLT) Management in Achieving the Fund Effectiveness of Fuel Subsidy Reduction Compensation Program (PKPS BBM) still encounters four main obstacles. First, insufficiently allocated time has caused data collection and trainings for the data collectors not optimally conducted and demographically unwell-distributed. Second, the indicators of poor family can not be applicable for all areas. Third, lacking coordination among institutions has resulted in insufficient control. Fourth, the effectiveness of BLT PKPS BBM fund at Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu District has yet to be achieved in the terms of the right target, timeliness, and advantages.

Keywords: direct cash grant, effectiveness, reduction, compensation.

A. LATAR BELAKANG

Dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 masih sangat dirasakan sampai saat ini. Salah satu dampak yang ditimbulkannya adalah meningkatnya jumlah rakyat miskin. Kesulitan rakyat miskin semakin berat dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai 50%-80% pada bulan Oktober 2005 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yang membawa akibat terhadap meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok barang dan jasa. Kenaikan BBM tersebut juga turut berperan dalam menambah jumlah warga miskin sekitar dua kali lipat dari sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 mencapai 39,05 juta jiwa atau 17,75 % dari total jumlah penduduk di Indonesia (Berita Resmi Statistik, No. 47/IX/1 September 2006).

Berdasarkan data yang ada dalam Labuhanbatu dalam Angka Tahun 2006 di

Kabupaten Labuhanbatu, jumlah rumah tangga miskin pada tahun 2006 sebanyak 65.211 rumah tangga atau 32,01% dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Labuhanbatu. Tingginya jumlah keluarga miskin di Kabupaten Labuhanbatu selain disebabkan sisa dari dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 juga turut dipengaruhi oleh naiknya harga BBM yang membawa dampak pada kesulitan ekonomi terutama bagi keluarga menengah ke bawah.

Terhitung mulai 1 Oktober 2005, bersamaan dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pemerintah telah merealisasikan *Cash Transfer* (Bantuan Langsung Tunai) bagi keluarga miskin. *Cash Transfer* merupakan dana kompensasi atas pengurangan subsidi BBM, dimana setiap keluarga miskin akan menerima sebesar Rp 100 000,- perbulan selama setahun, yang dibayarkan per tiga bulan sekali. Rumah tangga miskin yang berhak menerima bantuan diidentifikasi oleh BPS dengan menggunakan metode uji pendekatan kemampuan (*proxy-means testing*). Jumlah keluarga miskin yang telah terdaftar mencapai 15.648.425 keluarga, dimana Medan (Sumatera Utara) termasuk dari 15 kota besar yang menyalurkan kartu keluarga miskin sebagai bukti keluarga yang berhak menerima cash transfer. Kota besar lainnya adalah Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Palembang, Makasar, Padang, Jayapura, Sorong, Denpasar, Bogor, Surakarta. Payung hukum pelaksanaan BLT PKPS-BBM ini adalah Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005. Secara umum dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2005 tersebut diatur tugas-tugas Menteri dan Kepala BPS agar pelaksanaan BLT dapat berjalan lancar dan tertib.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana BLT warga miskin yang akan memperoleh dana BLT harus memiliki Kartu Kompensasi BBM (KKB) yang diperoleh berdasarkan dari hasil pendataan BPS kemudian ditukarkan pada Kantor Pos terdekat warga miskin bertempat tinggal agar dana BLT tersebut dapat dicairkan. Adapun mekanisme pendistribusian KKB adalah: (1) Pendataan keluarga miskin yang berhak mendapatkan KKB untuk penyiapan daftar nama rumah tangga miskin dan pencetakan KKB; (2) Pengiriman KKB ke BPS Kabupaten/Kota; (3) Pencocokan dan penelitian ulang penerima KKB; dan (4) Pendistribusian KKB.

Dalam upaya menunjang kelancaran penyaluran dana PKPS-BBM tersebut pemerintah membuat petunjuk teknis pelaksanaan agar tercipta kesatuan langkah diantara instansi terlibat, yaitu Departemen Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bekerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia dan PT. Pos Indonesia sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Depsos, BRI dan PT. Pos Indonesia Nomor 96/HUK/2005 tanggal 16 September 2005 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin dan Keputusan Mensos No.95/HUK/2005 tanggal 20 September 2005 tentang Penunjukan PT. Pos Indonesia dan BRI selaku Penyalur Dana bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah tangga Miskin. Dalam mengukur efektifitas PKPS BBM mengacu pada *Integrated Performance Model System* (IPMS) yaitu dengan *Critical Success Faktor* (CSF) meliputi sasaran, waktu, dan jumlah. (LHA PKPS-BBM:2004).

Namun demikian, berdasarkan pengamatan di lapangan, masih banyak kelemahan dalam pengelolaan dana BLT tersebut, terutama dalam proses penyalurannya, sehingga membawa dampak negatif berupa ketidakpuasan rakyat akan hasil dari model penyaluran yang digunakan. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Camat Rantau Selatan, belum seluruh rumah tangga miskin yang ada di Kecamatan Rantau Selatan terdaftar sebagai penerima dana BLT. Dari 3.571 rumah tangga miskin di Kecamatan Rantau Selatan hanya 2.509 rumah tangga miskin atau 70,26% yang terdaftar

sebagai penerima dana BLT.

Tidak tepatnya sasaran penerima BLT PKPS-BBM juga dapat dilihat pada kenyataan di lapangan, warga yang mencairkan dana BLT ke Kantor Pos termasuk golongan ekonomi menengah, hampir 40% warga menggunakan kendaraan sepeda motor saat mencairkan dana BLT tersebut, bahkan hampir 70% pakaian yang mereka kenakan pada saat mengambil dana tersebut tergolong mewah serta 30% terutama ibu-ibu ada yang memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Selain itu, menurut pemberitaan media lokal hampir 15% warga terdata secara ganda sehingga mereka mendapat KKB ganda.

Beberapa faktor yang diperkirakan melatar belakangi kesalahan sasaran adalah: (1) tidak meratanya kapasitas pencacah/petugas pendata dan tidak ditunjang oleh pelatihan dan bimbingan yang memadai. Pencacah/Petugas pendata adalah aparat desa/kelurahan dan warga yang ditunjuk Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dengan pertimbangan Kepala Desa/Lurah; (2) cukup tingginya subyektivitas pencacah/petugas pendata setempat; (3) prosedur penyaringan rumah tangga miskin tidak dilakukan secara seksama; (dan (4) terdapat indikasi adanya penjatahan jumlah rumah tangga target sampai di tingkat RT.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : "Mengapa Pengeloan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Pencapaian Efektivitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di Kecamatan Rantau Selatan Belum Tercapai".

B. LANDASAN TEORITIS

Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengemukakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa teori yang penulis angkat dalam penelitian ini diantaranya adalah administrasi keuangan, keuangan negara, efektivitas, bantuan langsung tunai, dan Kompetensi. Pada akhir bahasan tentang teori akan disampaikan operasionalisasi variabel agar pembaca mempunyai kesamaan persepsi tentang konsep yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Pengertian Administrasi Keuangan

Keuangan dapat diibaratkan sebagai aliran darah kehidupan dalam setiap organisasi. Keuangan merupakan kegiatan penunjang yang sangat penting maka di dalamnya juga diperlukan proses kegiatan administrasi. Menurut Thavaray (Abdullah & Ridwan, 1987: 138): "Administrasi keuangan berkaitan dengan sistem penyusunan, pengaturan dan pembagian sumber dana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan kestabilan, keadilan pembagian (pemerataan), dan peningkatan laju pertumbuhan organisasi tertentu. Kemudian Pfiffner dan Presthus (Abdullah & Ridwan, 1987: 137) menjelaskan sebagai berikut: "*Finacial administration is composed of three broad elements, each of will be examined in detail in subsequent chapeters. The most basic of these is fiscal policy determination, which concern the role of political leaders in hammering out of the broad outlines of programs in authorizing appropriations to carry them out. This aspect includes problems of employment, taxation and revenue, deficit financing, etc. Problems that require more extensive discussion than can be given here Instead, we shall assume that revenues are available and that the initial problem is for legislatures and chief executives to allocate them among severall program areas. A second element in financial administration is broad problem of accountability, that is of ensuring that money is spent wisely and honestly by political leaders and their administratives aids. Finally there is the management element, which includes fiscal organization-various financial officers and their duties-and the budget process*".

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan adalah kebijaksanaan dalam penyusunan, pengaturan dan pembagian sumber dana yang dibutuhkan disertai dengan pertanggungjawaban untuk pemeliharaan kestabilan, pemerataan dan peningkatan laju pertumbuhan suatu organisasi atau negara.

Kebijaksanaan dalam penyusunan, pengaturan dan pembagian sumber dana yang terencana dan terorganisir dengan baik dalam pengelolaan dana BLT PKPS-BBM oleh pemerintah akan lebih memudahkan penyaluran dana BLT tepat mencapai sasaran dan meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga pengelolaan dana BLT lebih akuntabel dan transparan.

2. Pengertian Keuangan Negara

Pembangunan yang dilakukan suatu negara adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dalam pembangunan dibutuhkan dana-dana atau yang disebut keuangan negara untuk membiayai pembangunan tersebut, oleh karenanya negara harus memiliki sumber-sumber dana dan kemampuan pengelolaannya agar pengeluaran negara efektif dan efisien.

Menurut Musgrave (Larasati, et al: 1994: 118) makna keuangan negara adalah sebagai berikut: "Keuangan negara mempelajari tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran pemerintah, mempelajari tentang kegiatan rumah tangga negara termasuk penerimaan dan pengeluarannya juga tentang aspek-aspek kebijaksanaan ekonomi yang timbul pada saat pelaksanaan". Sementara itu Suparmoko (1986: 5) menjelaskan: "Keuangan Negara bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruh di dalam perekonomian tersebut. Pengaruh-pengaruh itu terutama terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti: pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang lebih merata, peningkatan efisiensi dan penciptaan kesempatan kerja". Dari kedua pengertian tersebut terlihat bahwa keuangan negara merupakan kegiatan pemasukan dan pengeluaran di dalam pembiayaan rumah tangga negara serta pengaruh aspek-aspek lain yang berhubungan dengan ekonomi yang timbul pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan.

Sementara itu dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa "Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Sedangkan Buchanan (Larasati, et al, 1994: 119) menjelaskan: "Keuangan negara mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai suatu unit keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan cara dan bagaimana penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan tetapi juga tentang perbedaan-perbedaan kebijaksanaan yang ada yang mungkin dilaksanakan sebagai pilihan untuk melaksanakan kebijaksanaan dan aktivitas pemerintah". Adapun C. Plehm (Larasati, et al, 1994: 119) mendefinisikan keuangan negara sebagai: "Ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembiayaan kegiatan pemerintah". Dari beberapa pengertian tersebut terlihat bahwa dalam keuangan negara tidak hanya melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran sebagai aktivitas ekonomi tetapi juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan.

3. Transfer Tunai

Transfer tunai adalah pemberian subsidi yang berupa uang tunai kepada keluarga

miskin/berpenghasilan rendah (Syamsi, 1994: 68). Transfer tunai merupakan salah satu teknik yang digunakan pemerintah dalam pemerataan pendapatan. Pemerataan Pendapatan adalah suatu usaha yang dilakukan pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi merata mungkin di antara warga masyarakat. Pengertian merata di sini tidak berarti semua warga masyarakat memiliki pendapatan yang sama. Namun pemerataan yang dimaksud adalah adanya redistribusi pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional.

Bila dikaitkan dengan redistribusi pendapatan di atas maka pemberian dana BLT PKPS-BBM termasuk dalam kategori transfer tunai yang diperuntukkan kepada keluarga miskin dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaannya pemberian transfer tunai ini memiliki kebaikan dan keburukan. Kebaikannya yaitu penerima dapat menggunakan uang untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya, keburukannya adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan pemberian transfer tunai tersebut.

4. Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 534) berasal dari kata "kelola" yang artinya mengurus, melakukan dan menyelenggarakan. Selanjutnya pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan itu adalah mengurus dan menyelenggarakan dengan penerahan segenap kemampuan dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien sehingga tercapai hasil yang optimal.

Pengertian pengelolaan tersebut senada dengan pengertian manajemen dan sumber-sumber manajemen yang ditulis Terry dimana di dalam manajemen ada *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (menggerakkan), dan *controlling* (pengawasan). Pendapat ini didukung oleh pendapat Matindas (2002: 1) sebagai berikut: "Manajemen adalah kata bermakna ganda. Kata ini bisa digunakan untuk pelaku maupun untuk hal yang dilakukan. Di satu pihak manajemen dapat diartikan sebagai pengelola, sebagai pelaksana kegiatan manajemen. Di pihak lain manajemen dapat pula diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan para manajer".

Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau dikenal juga dengan sebutan transfer tunai dapat didefinisikan sebagai pembagian bantuan dalam bentuk uang tunai kepada kelompok kurang mampu dan mereka yang rentan untuk jatuh menjadi miskin tanpa adanya transfer (Institut Bank Dunia: 2006). Dengan membuat analisis pengertian ini, maka pengelolaan dana BLT dapat juga disebut manajemen dana BLT yaitu pengurusan dan penyelenggaraan dana BLT dengan penerahan segenap kemampuan dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sehingga tercapai hasil yang optimal. BLT dapat diberikan dalam bentuk bantuan sosial, asuransi, keringanan pajak, dan transfer non-publik. Bantuan Langsung tunai (BLT) terutama yang berasal dari program-program pemerintah, memiliki berbagai macam tujuan, dimana BLT merupakan jenis utama dari jaring pengaman sosial.

Manfaat utama dari BLT adalah tidak secara langsung mendistorsi harga. Manfaat kedua, BLT menstabilkan perekonomian makro, sejauh sasaran transfer tersebut meningkat ketika perekonomian melemah dan menurun ketika perekonomian mulai

pulih. Lebih jauh lagi, ketika sarana administratif telah ada, biaya menjalankan program BLT lebih rendah daripada menyediakan bantuan dalam bentuk barang ataupun jasa. Selain itu, berbeda dengan subsidi konsumsi, program BLT biasanya tidak dipengaruhi oleh harga barang atau biaya hidup, membuat program semacam ini dari sudut pandang penerima, subsidi tunai memberikan mereka kebebasan pilihan dalam penggunaan bantuan yang mereka terima untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan memberi mereka tingkat kepuasan yang lebih pada setiap tingkatan pendapatan dibandingkan dengan transfer dalam bentuk natura. Disamping itu, penyedia dana program ini merasakan stigma yang berkurang yang terkait dengan program ini.

Program BLT yang dirancang dengan baik dapat membantu mengatasi kemiskinan, sementara program BLT yang tidak dirancang dengan baik dapat memperburuk masalah. Pengalaman internasional menyarankan beberapa hal yang harus dimiliki oleh program BLT yang baik (Institut Bank Dunia: 2006) adalah: (1) mencocokkan jenis program dengan kebutuhan; (2) seleksi penerima; dan (3) membangun kemampuan administratif.

Adapun indikator pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah: perencanaan dan pengorganisasian dan pengawasan. Yang dimaksud perencanaan adalah proses menentukan aktivitas kegiatan dalam pengelolaan dana BLT, sedangkan pengorganisasian adalah pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perencanaan dan pengorganisasian dalam pengelolaan dana BLT meliputi bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana BLT yang dimulai dari proses pendataan, sosialisasi dan pendistribusian secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

Sedangkan yang dimaksud pengawasan adalah mengatur dan mengarahkan pengelolaan dana BLT agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan pencegahan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana BLT. Tujuan yang paling utama dalam kegiatan PKPS-BBM adalah bagaimana kegiatan program dapat sampai kepada sasaran (keluarga miskin) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka dengan sistem pengawasan/pengendalian yang baik diharapkan dapat mencegah lolosnya pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan menjadi penerima dana BLT serta meminimalkan terjadinya berbagai penyimpangan.

5. Pengertian Efektivitas

Tujuan manajemen adalah untuk mencapai hasil kerja secara efektif dan efisien. Walaupun banyak yang setuju bahwa manajemen memegang peranan utama dalam mencapai efektivitas organisasi tetapi sulit sekali merinci apa yang dimaksud dengan konsep efektivitas. Secara umum memang belum ada kesesuaian pendapat mengenai konsep efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam sesuatu perbuatan (Ensiklopedi Administrasi, 1989: 149). Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan menurut Handoko (1993: 7): "Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan".

Kemudian Barnard (Gibson, 1984: 27) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Efektivitas sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas". Definisi lain yang dapat dijadikan acuan ialah pendapat Emerson (Handyaningrat, 1985: 16): *'Effectivity is measuring in term of attaining prescribed goals or objectives'* (Efektivitas ialah pengukuran dalam arti pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.) Dari

pengertian tersebut jelaslah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hal ini dikatakan efektif. Jadi apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif. Pendapat senada dari Katz dan Kahn (Steers, 1985: 48) bahwa: 'Efektivitas sebagai usaha untuk mencapai suatu keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara'.

Dari berbagai pendapat tersebut terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. Dengan demikian efektivitas pada hakekatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, secara menyeluruh dapat disimpulkan, bahwa efektivitas pelaksanaan program BLT merupakan pencapaian sasaran dan tujuan untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak kenaikan BBM dengan didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, serta adanya interaksi antara atasan dan bawahan sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi, juga faktor-faktor pendukung seperti juga paham mengenai optimasi tujuan, perspektif sistematis dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi, akan berpengaruh terhadap kemampuan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah digariskan atau ditentukan secara maksimal mencakup kualitas, kuantitas dan waktu yang secara operasional efektivitas pengelolaan dana BLT diukur dengan indikator: tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat.

6. Operasionalisasi Variabel

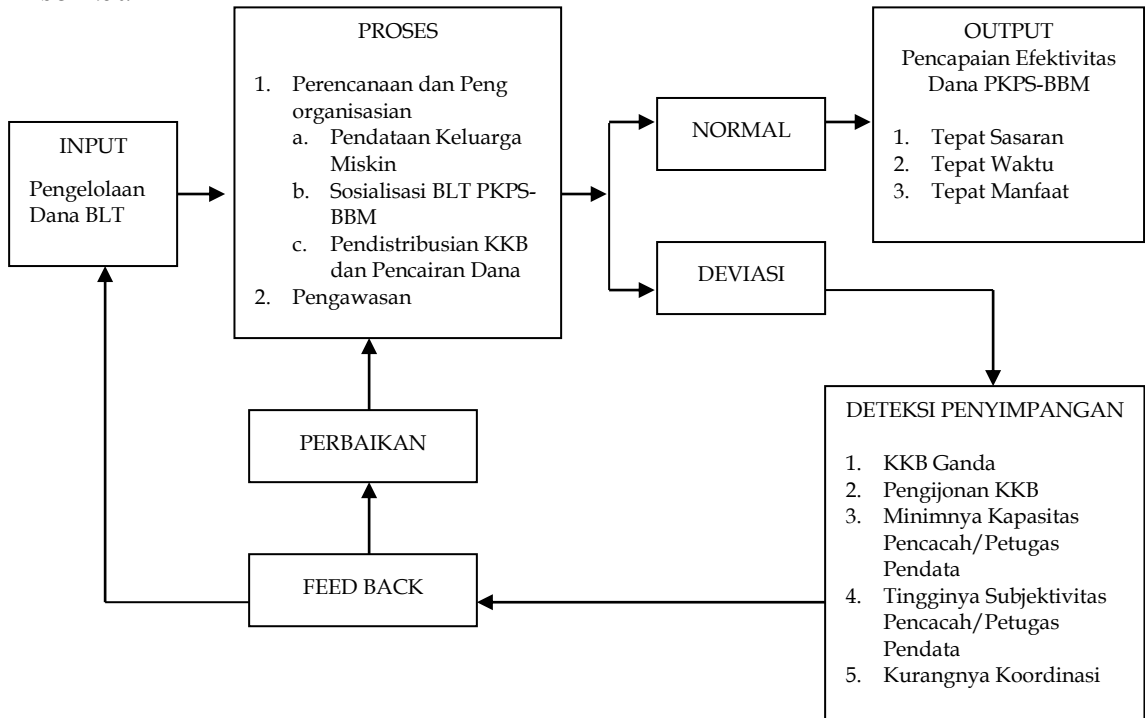
Dalam penelitian ini penulis mengambil variabel bebas merupakan Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan variabel terikatnya adalah Efektivitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Agar tidak terjadi perbedaan persepsi tentang pengertian kedua variabel tersebut, perlu kiranya diberikan definisi operasional untuk masing-masing variabel.

Pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai variabel bebas (X) dengan sub variabel perencanaan dan pengorganisasian serta pengawasan. Yang dimaksud dengan perencanaan dan pengorganisasian dalam penelitian ini adalah suatu proses untuk menentukan aktivitas kegiatan dan pembagian tugas dalam pelaksanaan program BLT. Jadi perencanaan dan pengorganisasian ini diukur dengan: (1) Pendataan yaitu kegiatan untuk menentukan keluarga miskin yang berhak menerima dana BLT; (2) Sosialisasi yaitu kegiatan pemberian informasi dan proses komunikasi pelaksanaan program BLT baik kepada aparat pelaksana maupun kepada masyarakat; dan (3) Pendistribusian yaitu proses penyerahan Kartu Kompensasi BBM (KKB) dan pencairan dana BLT bagi rumah tangga miskin yang telah ditetapkan berhak menerima dana BLT. Sedangkan yang dimaksud pengawasan dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan pemantauan agar pelaksanaan program BLT dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mencegah terjadi penyimpangan.

Efektivitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dengan sub variabel tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat. Tepat sasaran diukur dengan indikator pencapaian sasaran apakah penerima BLT PKPS-BBM telah sesuai dengan kriteria keluarga miskin yang telah ditetapkan pemerintah, serta jumlah yang diterima telah sesuai dengan jumlah yang dibagikan kepada keluarga miskin tersebut. Jadwal pendistribusian dana BLT PKPS-BBM merupakan indikator dalam pengukuran pencapaian efektivitas dana PKPS-BBM dengan melihat apakah waktu tersebut telah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Tepat manfaat pada dasarnya masih berkaitan dengan tujuan/sasaran, dimana tujuan utama pemberian

dana BLT bagi keluarga miskin adalah sebagai pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin atas kenaikan BBM. Dengan demikian efektivitas dana PKPS-BBM dapat tercapai jika pemanfaatan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pokok bukan pada kebutuhan sekunder.

Selanjutnya, definisi operasional variabel beserta parameter pengukuran/indikator penulis susun dalam bentuk matriks pengembangan instrumen penelitian dalam tabel berikut:



Gambar 1
Alur Pikir Penelitian

C. METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif. Menurut Nazir (1988: 64): "Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Tetapi dalam pengertian metode penelitian yang lebih luas, penelitian deskriptif mencakup metode penelitian yang lebih luas di luar metode sejarah dan eksperimental, dan secara lebih umum diberi nama metode survai". Melalui metode penelitian deskriptif tersebut, penulis akan membuat gambaran mengenai variabel yang terlibat dan menjadi fokus penelitian secara cermat melalui kegiatan pengumpulan data, fakta dan informasi, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan pendekatan kualitatif, sehingga akan terlihat bagaimana gambaran mengenai pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam pencapaian efektivitas dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kepala BPS Kabupaten Labuhanbatu 1 (satu) orang, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) 1 (satu) orang, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Labuhanbatu, Kepala Kantor Pos Kabupaten

Labuhanbatu, Camat Rantau Selatan, Kepala Desa/Lurah berjumlah 9 (sembilan) orang dan 9.367 kerluarga di sembilan kelurahan di Kecamatan Rantau Selatan. Sedangkan untuk menentukan jumlah sampel dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan Slovin (Sevilla et.all, 1993:161), sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

N = Ukuran sampel

N = Jumlah Populasi

E = Nilai kritis (batas ketelitian yang diinginkan, persen kelonggaran ketidak efektifan karena kesalahan pengambilan sampel populasi).

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{9.382}{1 + 9.381(0,1)^2}$$

$$n = 98,95 = 99$$

Sedangkan untuk menentukan perwakilan sampel masyarakat (rumah tangga) masing-masing Desa/Kelurahan, penulis menggunakan rumus seperti yang dikemukakan Singarimbun (1995:25) sebagai berikut:

$$nk = \frac{Pk}{P} \times \text{ sampel}$$

Keterangan:

P_k = Jumlah anggota yang terdapat dalam stratum ke-k

P = Jumlah populasi seluruhnya

n_k = Jumlah sampel tiap-tiap kelurahan

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus tersebut, diperoleh jumlah populasi dan sampel seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1
Populasi dan Sampel

No.	Unit Penelitian	Populasi	Sampel
I	Lembaga Pemerintah		
1	Kepala BPS Kab. Labuhanbatu	1	1
2	Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)	1	1
3	Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi	1	1
4	Kepala Kantor Pos Kabupaten Labuhanbatu	1	1
5	Camat Rantau Selatan	1	1
6	Kepala Desa/Lurah	9	3
II	Masyarakat (Rumah Tangga/Keluarga)		
1	Kelurahan Bakaran Batu	1.395	15
2	Kelurahan Sioldegan	1.269	14
3	Kelurahan Urung Kompas	1.036	11
4	Kelurahan Danau Bale	856	10
5	Kelurahan Pardamean	1.492	16
6	Kelurahan Sigambal	1.250	14

7	Kelurahan Lobusona	368	4
8	Kelurahan Ujung Bandar	803	8
9	Kelurahan Sidorejo	898	10
	Jumlah	9.381	110

Sumber : Pengolahan Data 2007

Selanjutnya dari jumlah sampel tersebut untuk menetapkan sampel individunya dari sampel yang berlatar belakang masyarakat, penulis tetapkan dengan didasarkan pada teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), menurut Nasution (1996:98), disebutkan bahwa: “*Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri yang spesifik yang dimiliki oleh sampel itu”.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan kepustakaan, wawancara, penyebaran kuesioner, dan observasi. Adapun pengolahan data dilakukan dengan melalui tahap sebagai berikut: (1) Melakukan seleksi angket, yang dilakukan untuk mengetahui apakah angket telah diisi dengan benar dan memenuhi syarat untuk diolah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan; (2) Mengklasifikasikan data, dimaksudkan untuk mempermudah penelitian dan pengelompokan data yang sudah terkumpul sesuai dengan problematik penelitian; (3) Memberikan kode terhadap data, dimaksudkan agar data yang terkumpul melalui angket ini bisa dengan mudah dikenali, pelaksanaan kegiatannya adalah dengan memberikan nomor secara urut terhadap hasil pilihan para responden; dan (4) Mentabulasikan data, bertujuan untuk melihat kecenderungan dari tiap-tiap item.

Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif, yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan mentabulasikan data ke dalam tabel yang kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik perhitungan sebagai berikut: (a) Menentukan skor penelitian yakni mengalikan frekuensi tanggapan responden terhadap bobot nilai setiap alternatif jawaban dalam bentuk tabel skor; (b) Menentukan skor minimum, yakni bobot nilai terendah dikalikan jumlah pernyataan dan jumlah responden; (c) Menentukan skor maksimum, yakni bobot tertinggi dikalikan jumlah pernyataan dan jumlah responden; dan (d) Menentukan besar persentase skor penelitian dengan menggunakan rumus tertentu. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase tanggapan responden adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{\text{Jumlah Skor Jawaban Hasil Penelitian}}{\text{Jumlah Skor Jawaban Ideal}} \times 100\%$$

Kemudian hasil pengolahan data yang berupa persentase rata-rata tanggapan responden tersebut, dinilai dengan mengkaitkannya dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2
Kriteria Penilaian

No	Interval	Kriteria Penilaian
1.	81,25% - 100,00%	Baik

2.	62,50% - 81,24%	Cukup/Sedang
3.	43,75% - 62,49%	Kurang Baik
4.	25,00% - 43,74%	Tidak Baik

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Analisis data dilakukan dengan menghitung, mempersepsikan, dan menafsirkan data hasil penelitian yang telah diolah dengan cara tertentu. Analisis dilakukan dengan menampilkan hasil pengolahan data variabel X kemudian diteruskan dengan analisis data variabel Y.

1. Variabel Pengelolaan Dana BLT

Variabel pengelolaan dana BLT terdiri dari dua indikator yaitu perencanaan dan pengorganisasian dan pengawasan. Indikator perencanaan dan pengorganisasian mempunyai tiga sub indikator, yaitu pendataan, sosialisasi, dan pendistribusian yang masing-masing akan dipaparkan berikut ini.

Dalam proses pendataan untuk menentukan keluarga miskin yang berhak menerima dana BLT PKPS-BBM, BPS adalah lembaga yang bertanggung jawab sekaligus pelaksana pendataan rumah tangga/keluarga miskin. Di setiap kecamatan BPS menempatkan seorang KSK (Koordinator Statistik Kecamatan) yang dibantu oleh seorang Pembantu KSK (PKSK). Sebagian besar KSK adalah Mantri Statistik (Mantis) dan sebagian lagi adalah staf BPS kabupaten/kota yang ditunjuk karena tidak semua kecamatan memiliki Mantis (Mantri Statistik). Sedangkan PKSK biasanya berasal dari staf kecamatan setempat yang direkrut selama satu bulan oleh BPS atau ada juga yang berasal dari staf BPS sendiri. Dalam pelaksanaan pendataan, karena keterbatasan waktu dan personil, serta mengacu pada surat Mendagri No.413.3/1941/SJ tentang Pendataan Penduduk Miskin Seluruh Indonesia tanggal 1 Agustus tahun 2005, BPS melibatkan aparat pemerintahan desa/kelurahan dan mitra BPS sebagai Petugas Pencacah Lengkap (PCL). Pencacah bekerja di bawah koordinasi KSK dan PKSK.

Dari hasil pengamatan di lapangan yang telah dilakukan penulis ditambah dengan hasil wawancara dan hasil pengolahan kuesioner dari responden masyarakat dapat diketahui bahwa: pertama, pemilihan petugas pencacah untuk setiap desa diserahkan sepenuhnya oleh BPS Kabupaten Labuhanbatu kepada masing-masing Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). KSK dalam memilih petugas pencacah bekerjasama dengan para Kepala Desa/Lurah. Berdasarkan pengamatan penulis petugas pencacah setiap desa rata-rata berjumlah tiga sampai empat orang untuk mendata satu desa atau kelurahan. Petugas pencacah dipilih oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan usulan dari RT/RW. Persyaratan pemilihan pencacah diutamakan yang berpengalaman dalam pendataan atau yang memiliki pendidikan minimal SLTA. Namun tidak setiap desa dapat memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini disebabkan tidak semua warga yang ditunjuk bersedia menjadi pencacah, warga yang menolak memberi alasan memiliki pekerjaan lain yang tidak dapat ditinggalkan, ada juga warga yang berpengalaman menjadi pendata tidak bersedia lagi menjadi pendata karena imbalan yang diberikan sangat kecil. Karena keterbatasan waktu para Kepala Desa memilih warga yang bersedia saja menjadi pencacah walaupun mereka hanya tamatan SLTP.

Kedua, petugas pencacah masing-masing desa yang terpilih diberikan pelatihan oleh KSK. KSK sebelumnya telah diberikan pelatihan yang dilaksanakan di BPS Propinsi Sumatera Utara. Pelatihan yang diberikan oleh KSK kepada pencacah meliputi penjelasan

tahap pendataan, penjelasan pengisian formulir dan kuesioner serta penjelasan lain tentang pendataan. Berdasarkan wawancara dengan KSK Rantau Selatan, diperoleh keterangan bahwa tidak semua desa mengirimkan pencacahnya ke Kecamatan, ada juga Lurah/Kepala Desa yang mengirimkan staf-staf mereka untuk mengikuti pelatihan pendataan, para staf inilah yang memberikan pelatihan kepada petugas pencacah yang terpilih.

Ketiga, mekanisme pendataan yang dilakukan adalah pencacah langsung melakukan wawancara dari rumah ke rumah, kemudian hasil pendataan dikirimkan ke KSK Rantau Selatan. Kemudian KSK mengirimkannya ke BPS Kabupaten Labuhanbatu untuk kemudian dikirim ke BPS Pusat.

Adapun tanggapan responden terhadap indikator pendataan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Tanggapan Responden Terhadap Pendataan

No.	Objek yang diteliti	Frekwensi Alternatif Jawaban								Total		
		A = 4		B = 3		C = 2		D = 1		f	Skor	%
		f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor			
1.	Ketelitian dalam pendataan	14	56	18	54	29	58	41	41	102	209	51,23
2.	Pemahaman calon peserta BLT	17	68	16	48	31	62	38	38	102	216	52,94
Jumlah										425		

Skor Ideal : $4 \times 2 \times 110 = 880$

Skor Hasil Penelitian : 425

Persentase Skor Hasil Penelitian: $(425/880) \times 100\% = 48\%$

Berdasarkan data yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pendataan termasuk dalam kategori kurang baik. Kemudian, berdasarkan data yang ada, penulis menyimpulkan bahwa item-item pertanyaan yang disampaikan pencacah masih kurang dimengerti masyarakat, hal ini disebabkan kurangnya kemampuan pencacah dalam menterjemahkan pertanyaan yang disampaikan kepada masyarakat ke dalam bahasa yang mudah dimengerti, pencacah terlalu kaku berpatokan mengikuti kuesioner yang ada. Dalam wawancara dengan BPS Kabupaten Labuhanbatu, diperoleh keterangan bahwa kemampuan pencacah memang belum merata, karena pengalaman dan latar pendidikan pencacah yang berbeda-beda, singkatnya waktu pelatihan yang diberikan juga turut mempengaruhi kinerja pencacah. Kurang optimalnya pendataan juga dipengaruhi oleh sedikitnya jumlah pendata yang rata-rata berjumlah tiga atau empat orang untuk setiap desa dengan waktu pendataan yang diberikan selama dua minggu, ini membuat pencacah melakukan pendataan terburu-buru. Sehingga item pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat sangat singkat, jawaban yang diperoleh dari masyarakatpun hanya jawaban singkat yang kurang dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dari keluarga yang didata. Selain itu di beberapa desa, tidak semua pencacah melakukan wawancara langsung dengan masyarakat, mereka hanya berpatokan pada data jumlah keluarga miskin yang telah ada sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan sosialisasi, dari hasil pengamatan di lapangan yang telah dilakukan penulis ditambah dengan hasil wawancara dan hasil pengolahan kuesioner dari responden masyarakat dapat diketahui bahwa: pertama, kegiatan sosialisasi baru dilakukan hanya kepada instansi yang terkait dalam pelaksanaan program BLT, sosialisasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan BPS Kabupaten

Labuhanbatu dengan mengundang para Camat, Kepala Desa dan instansi terkait untuk membahas pelaksanaan pendataan yang akan dilakukan dalam menjaring keluarga miskin yang akan mendapat dana BLT. Sosialisasi untuk masyarakat dilakukan pada saat pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh pencacah dari rumah ke rumah, namun tidak semua pencacah melakukan sosialisasi dengan baik. Sebagian pencacah menjelaskan pendataan yang dilakukan adalah untuk sensus penduduk dan tidak menjelaskan tentang tujuan pendataan untuk memperoleh data rakyat miskin yang akan mendapat dana BLT. Kurangnya sosialisasi ini menurut KSK Rantau Selatan disebabkan sebagian pencacah tidak ikut di dalam pelatihan tetapi hanya diwakilkan kepada Staf Desa/Kelurahan. Informasi lain yang diterima dari Kepala Desa Sidorejo. Berdasarkan wawancara dengan Kepala BPS Kabupaten Labuhanbatu didapat keterangan, sosialisasi tidak dapat dilakukan dengan optimal karena waktu yang diberikan sangat singkat sekali sehingga kegiatan lebih difokuskan pada pelaksanaan pendataan.

Kedua, kurangnya sosialisasi terutama untuk pencacah juga menimbulkan persepsi masing-masing bagi pencacah dalam memahami petunjuk yang diberikan, terutama dalam menerjemahkan 14 kriteria variabel kemiskinan di dalam melaksanakan pendataan.

Ketiga, proses Sosialisasi seyogyanya dilakukan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Labuhanbatu, namun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Labuhanbatu diperoleh keterangan bahwa proses sosialisasi baru dilaksanakan setelah program BLT berjalan beberapa bulan. Sosialisasi inipun lebih kepada sosialisasi untuk jajaran Pemda, sedangkan sosialisasi untuk masyarakat sangat kurang sekali, sosialisasi terlambat dilaksanakan karena juklak dan juknis baru diterima setelah program BLT ini berjalan beberapa bulan, kalau pun masyarakat tahu program BLT ini karena mereka mendapat informasi dari media cetak atau elektronik atau juga informasi yang diperoleh dari mulut kemulut. Program BLT ini dapat dikatakan untuk pemerintah daerah kurang begitu dilibatkan, semuanya telah diatur dari pusat, walaupun daerah dilibatkan hanya dalam pendataan saja, sehingga yang lebih banyak terlibat adalah BPS.

Adapun tanggapan responden terhadap indikator sosialisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4
Tanggapan Responden terhadap Sosialisasi

No	Objek yang diteliti	Frekwensi Alternatif Jawaban								Total		
		A = 4		B = 3		C = 2		D =1		f	Skor	%
		f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor			
3.	Penjelasan dari pemerintah	11	44	19	57	25	50	47	47	102	198	48,53
4.	Pemahaman calon peserta BLT mengenai fungsi pendataan	9	36	16	48	31	62	46	46	102	192	47,06
Jumlah										390		

Skor Ideal : $4 \times 2 \times 110 = 880$

Skor Hasil Penelitian : 390

Persentase Skor Hasil Penelitian: $(390/880) \times 100\% = 44\%$

Berdasarkan data yang ada, sosialisasi termasuk kategori kurang baik. Berdasarkan tanggapan responden tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah tentang program BLT hanya pada saat pendataan saja, sosialisasi

yang diberikanpun terkesan setengah-setengah dan kurang transparan, sebab pada awal pendataan masyarakat banyak yang belum tahu tujuan program BLT ini, sehingga informasi yang menyebar dimasyarakat simpang siur dan menimbulkan gejolak sosial yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Rantau Selatan. Hal ini disebabkan waktu yang terbatas dalam mengejar target pendataan agar dana BLT dapat segera dicairkan dan kurangnya keterlibatan pemerintah daerah sehingga tidak ada instansi yang dapat benar-benar merasa bertanggung jawab serta kemampuan pencacah dalam memberikan penjelasan tidak merata di setiap daerah.

Dalam kaitannya dengan pendistribusian, penulis memaparkan secara singkat dalam paparan berikut ini. Dalam wawancara dengan Kepala BPS Kabupaten Labuhanbatu tentang pendistribusian KKB, diperoleh keterangan bahwa BPS Kabupaten Labuhanbatu menerima KKB dari BPS Pusat, kemudian BPS membagikannya ke masing-masing KSK, dari KSK diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah baru dibagikan kepada Para pencacah untuk didistribusikan langsung kepada warga yang berhak menerima BLT. Panjangnya proses pendistribusian ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sedangkan mengenai jumlah KKB yang diterima ditentukan oleh BPS Pusat, BPS Kabupaten hanya menyerahkan data miskin kepada BPS Pusat, penentuan berhak dan tidaknya warga miskin adalah wewenang BPS Pusat, hal ini disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia. Penentuan warga yang berhak mendapat KKB lebih diprioritaskan kepada warga yang benar-benar miskin berdasarkan hasil pendataan sebelumnya. Dengan demikian ada kemungkinan tidak semua warga yang telah didata mendapatkan KKB. Kedua, KKB dibagikan satu minggu sampai dengan dua hari sebelum pencairan dana BLT tahap pertama ditetapkan. Dalam setiap lembar KKB ada empat kupon, setiap kupon digunakan untuk satu kali pencairan. Pada tahap kedua dan selanjutnya masih ada beberapa KKB yang dibagikan kepada rumah tangga miskin.

Adapun tanggapan responden terhadap pendistribusian KKB dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5
Tanggapan Responden terhadap Pendistribusian KKB

No	Objek yang diteliti	Frekwensi Alternatif Jawaban								Total		
		A = 4		B = 3		C = 2		D = 1		f	Skor	%
		f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor			
5.	Pendistribusian KKB dibagikan langsung kepada penerima	40	160	31	93	19	38	12	12	102	303	74,27
6.	Pemeriksaan ulang atau proses pencocokan dan penelitian	28	112	23	69	32	64	19	19	102	264	64,71
Jumlah										567		

Skor Ideal : $4 \times 2 \times 110 = 880$

Skor Hasil Penelitian : 567

Persentase Skor Hasil Penelitian: $(567/880) \times 100\% = 64\%$

Berdasarkan data yang terlihat pada tabel dan perhitungan yang dilakukan, maka pendistribusian dapat dikategorikan cukup baik. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Bakaran Batu, diperoleh keterangan bahwa hasil pendataan yang dilakukan sudah tidak perlu dilakukan penelitian ulang, karena pada waktu pendataan dirasa sudah dilakukan sebaik mungkin mengingat waktu yang diberikan sangat singkat, dan petugas yang

membagikan KKB pun adalah petugas pencacah yang melakukan pendataan sebelumnya.

Pendistribusian yang dimaksud sebelumnya berkaitan dengan dana. Adapun hasil pengolahan data yang berkaitan dengan pendistribusian dana dapat dilihat pada penjelasan berikut.

Penyaluran dana kepada rumah tangga penerima BLT dilakukan oleh Kantor Pos. Penunjukkan kantor pos sebagai pelaksana pencairan dana BLT dinilai tepat oleh banyak kalangan. Kantor pos berpengalaman dalam melayani transfer dana masyarakat. Jumlah cabang kantor pos relatif banyak dan tersebar hingga ke tingkat kecamatan. Di samping itu, kemungkinan terjadinya kebocoran dana juga relatif kecil karena masyarakat secara langsung mengambilnya dari kantor pos.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pos Kabupaten Labuhanbatu tentang pendistribusian dana, diperoleh keterangan kendala yang dihadapi Kantor Pos dalam pendistribusian KKB adalah menumpuknya jumlah keluarga miskin yang akan mencairkan dana BLT dalam satu hari yang berasal dari tiga kecamatan, tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada. Hal ini membuat terjadinya beberapa kegaduhan seperti adanya warga yang pingsan, dan warga yang berdesak-desakan mudah terpancing emosi. Untuk mengantisipasi keadaan ini pencairan dana BLT pada tahap kedua dilaksanakan pengaturan jadwal pencairan dana BLT secara bergilir untuk masing-masing kecamatan. Kemudian, pencairan dana BLT tidak diperkenankan secara kolektif seperti oleh Kepala Desa atau Ketua RT/RW. Menurut Kepala Kantor Pos Kabupaten Labuhanbatu ini merupakan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya pemotongan dana yang diterima oleh keluarga miskin serta orang yang menerima dana ini benar-benar oleh orang memiliki KKB atas namanya sendiri. Selanjutnya, warga yang mencairkan dana BLT selain membawa kupon KKB juga harus membawa KTP sebagai tanda bukti benar-benar pemilik KKB tersebut.

Adapun tanggapan responden terhadap pendistribusian dana BLT dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6
Tanggapan Responden tentang Pendistribusian Dana

No	Objek yang diteliti	Frekwensi Alternatif Jawaban								Total		
		A = 4		B = 3		C = 2		D = 1		f	Skor	%
		f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor			
7.	Ketepatan pengambilan dana BLT di Kantor Pos	46	184	32	96	9	18	15	15	102	313	76,72
8.	Ketepatan pencairan per triwulan	24	96	7	21	33	66	38	38	102	221	54,17
Jumlah											534	

Skor Ideal : $4 \times 2 \times 110 = 880$

Skor Hasil Penelitian : 534

Persentase Skor Hasil Penelitian : $(534/880) \times 100\% = 60\%$

Berdasarkan data yang terlihat pada tabel dan perhitungan yang dilakukan, maka pendistribusian dapat dikategorikan kurang baik. Berdasarkan eksplorasi lebih lanjut diperoleh informasi sebagai berikut: pertama, menurut tanggapan responden, masyarakat setuju penunjukkan Kantor Pos sebagai tempat penganciran dana BLT, sebab masyarakat umumnya pernah berurusan dengan kantor pos dan keberadaan kantor pos mudah terjangkau. Selain itu proses administrasi tidak berbelit-belit jika dibandingkan pengambilan dana di instansi lain seperti Kantor Kelurahan atau Kecamatan, ini menambah kepercayaan masyarakat kepada kantor pos. Hal ini senada dengan pernyataan

Kepala Kantor Pos Kabupaten Labuhanbatu dalam wawancara penulis, penyaluran dana melalui kantor pos sepertinya sudah tepat, karena kantor pos sudah sangat familiar bagi masyarakat, berbeda dengan bank walau semua masyarakat tahu bank tempat menyimpan dan mengambil uang, tapi belum tentu semua masyarakat biasa berhubungan dengan bank, terutama masyarakat bawah, karena masih ada sebagian warga terutama masyarakat kelas bawah menganggap bank terlalu eksklusif. Keberadaan kantor pos mudah terjangkau dan masyarakat merasa lebih nyaman bila pengambilan dana di kantor pos dibandingkan dengan pendistribusian melalui pemerintah daerah seperti Camat atau Kepala Desa/Lurah. Kedua, menurut responden, bahwa pencairan dana BLT yang dilakukan dalam tiga bulan sekali dirasakan terlalu lama. Hal ini disebabkan jika dana tersebut dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan lebih baik jika dikeluarkan setiap bulan sehingga lebih meringankan beban hidup keluarga miskin.

Selanjutnya akan disampaikan hasil pengolahan data yang berkaitan dengan pengawasan. Dari hasil pengamatan di lapangan yang telah dilakukan penulis ditambah dengan hasil wawancara dan hasil pengolahan kuesioner dari responden masyarakat dapat diketahui: pertama, pelaksanaan pengawasan program BLT di Kecamatan Rantau Selatan belum dilaksanakan secara optimal, pengawasan yang dilakukan terutama oleh pemerintah daerah masih dalam bentuk sekedar menerima laporan dan keluhan masyarakat dari masyarakat tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan dana BLT. Setelah beberapa tahap penyaluran dana BLT dicairkan barulah dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantau Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (UPMP-PKPSBBM) yang ditugaskan untuk melakukan pemantuan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyaluran dana kompensasi BBM.

Kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Rantau Selatan tentang pengawasan, diperoleh keterangan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan BLT di Kecamatan Rantau Selatan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal. Pengawasan baru hanya terfokus pada kegiatan proses pendataan dan pendistribusian KKB, pengawasan yang dilakukanpun baru sekedar menerima laporan dan keluhan masyarakat serta menindak lanjutinya. Kurang optimalnya pengawasan salah satunya disebabkan singkatnya waktu yang diberikan terutama dalam mengejar target agar pencairan dana dapat dengan segera dilakukan. Kendala lain adalah tidak adanya instansi yang benar-benar merasa bertanggung jawab dalam pelaksanaan BLT ini terutama Pemerintah Daerah merasa kurang dilibatkan. Pembentukan UPMP-PKPSBBM pun terlambat dilakukan sebab juklak dan juknisnya terlambat diterima dari pusat baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan sehingga pengaduan masyarakat tentang program BLT lebih banyak disampaikan kepada RT/RW dan Kepala Desa daripada ke UPMP-PKPSBBM.

Ketiga, pengawasan terhadap dana BLT sangat sulit dilakukan sebab pemerintah daerah tidak mengetahui pasti jumlah alokasi dana yang dikelola, pengelolaan dana ini adalah wewenang Pemerintah Pusat dan daerah tidak mempunyai akses informasi untuk dana yang dikelola. Dalam wawancara dengan Kepala BPS Kabupaten Labuhanbatu diperoleh keterangan bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai akses informasi yang cukup terhadap alokasi dana BLT, sebab dana tersebut langsung di kirimkan ke masing-masing kantor pos.

Adapun tanggapan responden terhadap pengawasan BLT dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Tanggapan Responden terhadap Pengawasan

No	Objek yang diteliti	Frekwensi Alternatif Jawaban								Total		
		A = 4		B = 3		C = 2		D = 1		f	Skor	%
		f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor			
9.	Penyimpangan BLT menurut masyarakat	36	144	28	84	17	34	21	21	102	283	69,36
10.	Informasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang hasil pelaksanaan BLT	4	16	9	27	11	22	78	78	102	143	35,05
Jumlah										426		

Skor Ideal : $4 \times 2 \times 110 = 880$

Skor Hasil Penelitian : 426

Persentase Skor Hasil Penelitian : $(426/880) \times 100\% = 48\%$

Berdasarkan data hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan termasuk kategori kurang baik. Dari data yang ada, masyarakat masih peduli terhadap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan mengharapkan adanya transparansi dari pemerintah dalam setiap program yang dilaksanakan. Kemudian, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal, masyarakat akan mengetahui adanya penyimpangan atau tidak dalam suatu kebijakan jika pemerintah bersifat transparan dalam melaporkan hasil-hasil dari suatu kebijakan yang dilaksanakan.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perhatian dan harapan masyarakat terhadap pengelolaan BLT sangat tinggi, ini dapat dilihat dari laporan dan keluhan yang disampaikan masyarakat cukup banyak, namun hal ini belum diimbangi dengan respon yang diberikan oleh pemerintah terutama dalam hal transparansi pengelolaan BLT kepada masyarakat. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Bakaran Batu diperoleh keterangan, laporan dan keluhan yang disampaikan masyarakat lebih banyak disampaikan kepada RT/RW, keluhan yang disampaikan pun lebih banyak pada masalah pendataan misalnya tidak terdaftar sebagai penerima BLT, belum mendapatkan KKB dan pencacah yang tidak obyektif. Banyaknya laporan dan keluhan yang disampaikan pada awal-awal pelaksanaan BLT sampai dengan pencairan Tahap I saja, untuk selanjutnya keluhan tersebut bisa dikatakan hampir tidak ada.

Berikut disampaikan data hasil penelitian yang berkaitan dengan sub variabel tepat sasaran. Sub variabel tepat sasaran dalam variabel Efektivitas Dana PKPS BBM untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dana PKPS BBM di Kecamatan Rantau Selatan.

Dari hasil pengamatan di lapangan yang telah dilakukan penulis ditambah dengan hasil wawancara dan hasil pengolahan kuesioner dari responden masyarakat dapat diketahui: pertama, belum semua keluarga miskin yang ada di Kecamatan Rantau Selatan menerima dana BLT. Jumlah warga miskin yang tidak menerima dana BLT mencapai 30,47 % dari penduduk miskin yang ada. Dalam wawancara dengan Ketua BPS Kabupaten Labuhanbatu tentang jumlah keluarga miskin yang menerima BLT diperoleh keterangan bahwa jumlah keluarga miskin yang berhak menerima dana BLT ditetapkan oleh BPS Pusat disesuaikan dengan urutan tingkat kemiskinannya, karena jumlah dana yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah keluarga miskin yang ada diseluruh Indonesia. BPS Kabupaten hanya melaksanakan pendataan kemudian hasil pendataan dikirimkan oleh ke BPS Pusat untuk dilakukan perhitungan skor kemiskinan dalam menentukan prioritas keluarga miskin yang berhak menerima dana BLT.

Kedua, sasaran dana BLT belum tercapai secara maksimal sebab dana BLT juga turut dinikmati oleh keluarga yang tidak masuk kategori miskin. Berdasarkan pengamatan

penulis, sebagian keluarga yang menerima dana BLT memiliki kendaraan bermotor dan perhiasan emas.

Ketiga, jumlah dana BLT yang diterima oleh keluarga miskin hampir setiap desa diterima secara penuh tidak ada pemotongan baik dari kantor pos maupun dari aparat desa. Dalam beberapa desa, keluarga miskin yang menerima dana BLT memberikan sejumlah uang yang dikumpulkan secara sukarela kepada ketua RT/RW sebagai ucapan terimakasih, ini tidak dapat dimasukkan dalam kategori pemotongan sebab ini adalah inisiatif dari keluarga miskin itu sendiri.

Adapun tanggapan responden terhadap tepat sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8
Tanggapan Responden tentang Tepat Sasaran

No.	Objek yang diteliti	Frekwensi Alternatif Jawaban								Total		
		A = 4		B = 3		C = 2		D = 1		f	Skor	%
		f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor			
11.	Ketidaktepatan pendistribusian KKB	33	132	26	78	18	36	25	25	102	271	66,42
12.	Penerima BLT yang termasuk mampu	28	112	33	99	18	36	23	23	102	270	66,18
13.	Penerima BLT yang merupakan kerabat petugas pendata dan mampu	23	92	29	87	27	54	23	23	102	256	62,75
14.	Penerima KKB lebih dari satu dalam satu keluarga	32	128	26	78	18	36	26	26	102	268	65,69
15.	Pemotongan dana BLT	39	156	31	93	20	40	12	12	102	301	73,78
16.	Penjualan KKB kepada pihak lain	16	64	9	27	17	34	60	60	102	185	45,34
Jumlah										1.551		

Skor Ideal : $4 \times 6 \times 110 = 2.640$

Skor Hasil Penelitian : 1.551

Persentase Skor Hasil Penelitian : $(1.551/2.640) \times 100\% = 59\%$

Berdasarkan nilai persentase yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa aspek tepat sasaran dikategorikan kurang baik. Dari data yang tertera dalam tabel, secara umum dapat dikatakan bahwa efektivitas pencapaian sasaran belum tercapai dengan baik mengingat sebab ada keluarga yang mampu dan kerabat dekat pencacah menjadi penerima BLT, ini terjadi selain disebabkan tingginya subjektivitas pencacah juga disebabkan rendahnya kemampuan pencacah dalam melaksanakan pendataan. Tidak semua pencacah benar-benar memahami petunjuk yang diberikan dan kemampuan analisis pencacah juga sangat rendah dalam menganalisa hasil wawancara yang dilaksanakan selama pendataan. Namun hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Bakaran Batu menunjukkan adanya ketidaksepahaman dengan hasil tanggapan responden tentang subjektivitas pencacah. Dalam wawancara yang dilakukan, Kepala Desa Bakaran Batu menyatakan, memang benar subjektivitas pencacah menyebabkan ada penyimpangan dalam pendataan, warga yang tidak terdaftar sebagai keluarga miskin memperoleh KKB, namun jumlahnya relatif kecil. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa KKB yang dimiliki oleh keluarga yang bukan termasuk keluarga miskin ditarik kembali, masalah ini terekspos oleh media massa, sehingga masyarakat mengasumsikan

banyak warga yang tidak miskin mendapatkan KKB. Disamping itu, tidak semua masyarakat mengetahui adanya pendaftaran susulan untuk keluarga miskin yang tidak terjaring pada saat pencacahan tahap pertama, dalam pendaftaran susulan ada penambahan jumlah warga miskin yang diberikan KKB.

Dalam wawancara dengan Kepala Desa Sioldengan diperoleh keterangan, kemampuan sebagian pencacah masih sangat rendah, pencacah kurang mampu menganalisa hasil wawancara dengan keluarga yang didata sehingga jawaban yang diperoleh dijadikan acuan dalam menetapkan skor kemiskinan tanpa membandingkan dengan keadaan ekonomi keluarga yang didata untuk mengetahui jawaban yang diberikan adalah jujur atau tidak.

Kemudian, dalam wawancara dengan Kepala Desa Sidorejo, diperoleh keterangan bahwa, ada keluarga yang menerima KKB lebih dari satu bukan merupakan kesalahan dalam pendataan, hal ini terjadi karena dalam beberapa kasus ada dua kepala rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah, dan mereka memang termasuk keluarga miskin. Kemudian Kepala Desa Sidorejo menjelaskan bahwa jumlah uang yang diterima dipastikan tidak akan berkurang sebab warga yang mengambil dana BLT umumnya diambil langsung oleh mereka yang memiliki KKB.

Informasi lain yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pos Kabupaten Labuhanbatu diperoleh keterangan bahwa ada beberapa keluarga miskin yang mewakili pengambilan dana BLT dengan memberikan kuasa secara tertulis, ketika dikonfirmasi mengapa diwakilkan ada berbagai alasan yang diterima seperti sakit dan sudah tua. Pengambilan dana BLT milik orang lain dengan surat kuasa dapat dilakukan jika dengan alasan yang tepat dan membawa bukti KTP dari pemilik KKB tersebut.

Berikut akan disampaikan hasil tanggapan responden yang berkaitan dengan ketepatan waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pos Kabupaten Labuhanbatu, diperoleh keterangan bahwa Sumatera Utara masuk dalam penyaluran pertama untuk 15 kota strategis, dan untuk Kabupaten Labuhanbatu termasuk kecamatan Rantau Selatan pencairan dana BLT tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2005. Untuk kelancaran pencairan dana BLT, Kantor Pos Kabupaten Labuhanbatu bekerjasama dengan para Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk memberitahukan jadwal pencairan dana, karena pencairan dana ini tidak hanya dalam satu hari, diberikan himbuan kepada warga agar dalam mengambil dana BLT tidak berbondong-bondong pada hari pertama, namun pada kenyataannya hampir seluruh warga mengambil uangnya pada hari pertama, sehingga ada beberapa kesulitan yang dihadapi, namun hal ini dapat segera di atasi. Pada tahap ke II pencairan dilakukan pada bulan Januari 2006 dan tahap III dicairkan pada bulan April 2006, kalau untuk tahap I, II dan III sesuai dengan jadwal namun pada tahap IV mengalami keterlambatan seharusnya dicairkan Juni 2006 menjadi Oktober 2006, keterlambatan ini merupakan kebijakan dari pusat. Adapun tanggapan responden terhadap tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9
Tanggapan Responden tentang Tepat Waktu

No	Objek yang diteliti	Frekwensi Alternatif Jawaban								Total		
		A = 4		B = 3		C = 2		D = 1		f	Skor	%
		f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor			
17.	Keterlambatan penerimaan uang	11	44	15	45	25	50	51	51	102	190	46,56

Skor Ideal : $4 \times 1 \times 110 = 440$
 Skor Hasil Penelitian : 190
 Persentase Skor Hasil Penelitian: $(190/440) \times 100\% = 43\%$

Dari nilai persentase tersebut dapat dikatakan bahwa aspek ketepatan waktu dinilai kurang baik. Dengan kata lain masih sering terjadi keterlambatan dalam pencairan dana BLT. Berdasarkan wawancara dengan Camat Rantau Selatan tentang jadwal Pencairan dana BLT diperoleh keterangan, masyarakat cukup mengerti tentang keterlambatan pencairan dana BLT pada tahap IV, ada beberapa warga yang menanyakan tentang keterlambatan ini, setelah dijelaskan bahwa ini kebijakan dari pusat dan belum adanya dana yang tersedia, mereka cukup paham dengan jawaban yang diberikan.

Paparan selanjutnya berkaitan dengan ketepatan manfaat pembagian dana BLT. Pada prinsipnya pembagian dana BLT diharapkan dapat meringankan beban ekonomi penduduk miskin sebagai dampak kenaikan harga BBM. Dengan demikian dana BLT ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang kurang mampu. Inilah salah satu tujuan diberikannya dana BLT kepada keluarga miskin.

Dari hasil pengamatan di lapangan ditambah dengan hasil wawancara dan hasil pengolahan kuesioner dari responden masyarakat dapat diketahui bahwa penggunaan dana BLT selain untuk kebutuhan pokok banyak juga digunakan untuk kebutuhan sekunder seperti membeli barang-barang elektronik, baju dan perhiasan untuk lebaran. Adapun tanggapan responden terhadap manfaat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10
Tanggapan Responden terhadap Tepat Manfaat (n=masyarakat)

No	Objek yang diteliti	Frekwensi Alternatif Jawaban								Total		
		A = 4		B = 3		C = 2		D = 1		f	Skor	%
		f	Skor	f	Skor	f	Skor	f	Skor			
18.	Pemanfaatan uang untuk pemenuhan kebutuhan sekunder	35	140	29	87	18	36	20	20	102	283	69,36

Skor Ideal : $4 \times 1 \times 110 = 440$
 Skor Hasil Penelitian : 283
 Persentase Skor Hasil Penelitian: $(283/440) \times 100\% = 64\%$

Dari nilai yang diperoleh, dapat diketahui bahwa aspek ketepatan manfaat dinilai cukup baik. Namun demikian, melihat fenomena yang ada, tujuan utama pembagian dana BLT untuk meringankan beban masyarakat miskin belum tercapai secara maksimal, tidak semua warga menggunakan dana BLT untuk memenuhi kebutuhan pokok, terutama kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari, tetapi lebih banyak digunakan untuk kebutuhan lain yang bersifat sekunder dan ada juga yang digunakan untuk membayar hutang.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diperoleh melalui hasil penelitian sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: pertama, Program BLT PKPS-BBM adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi resistensi terhadap dampak penghapusan subsidi BBM dan kenaikan BBM. Pelaksanaan program BLT PKPS-BBM di Kecamatan Rantau Selatan telah diupayakan secara maksimal. Untuk mendukung kelancaran proses pendataan dan pendistribusian KKB, diberikan pelatihan kepada para petugas pencacah, namun pendataan yang dilaksanakan terburu-buru karena singkatnya waktu yang

diberikan. Pelaksanaan sosialisasi baru dilaksanakan hanya kepada instansi yang terlibat dalam pengelolaan BLT saja, sosialisasi kepada masyarakat tidak terlaksana sama sekali. Pendistribusian KKB dan pencairan dana berjalan cukup lancar namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan seperti KKB ganda, sasaran tidak tepat dan tingginya subjektivitas pencacah. Proses pengawasan juga sangat minim karena kurangnya transparansi dari pemerintah. Sasaran utama pelaksanaan BLT untuk mengurangi resistensi dampak kenaikan BBM yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok ternyata belum tercapai, uang yang diterima masyarakat penerima BLT lebih banyak digunakan di luar kebutuhan pokok.

Kedua, dalam pelaksanaan program BLT PKPS-BBM terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program tersebut. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu adalah singkatnya waktu yang diberikan sehingga proses pendataan, pemberian pelatihan kepada pencacah dan sosialisasi kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal dan mendalam. Penyeragaman kriteria miskin yang ditetapkan tidak selamanya sesuai dengan kondisi di suatu daerah sehingga sering menimbulkan kerancuan dalam pendataan. Kurang dilibatkannya pemerintah daerah secara keseluruhan membuat program ini terkesan proyek pemerintah pusat sehingga tidak ada instansi di daerah yang benar-benar merasa bertanggung jawab. Rendahnya keterlibatan Pemerintah Daerah berdampak pada tidak adanya koordinasi yang baik antara instansi di daerah menyebabkan lemahnya pelaksanaan pengawasan, pengawasan dilakukan bila dibutuhkan saja dan bila ada masalah yang timbul.

Ketiga, upaya yang dilaksanakan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program BLT PKPS-BBM adalah mengoptimalkan waktu yang ada dan mengikut sertakan aparat desa/kelurahan termasuk RT dan RW sebagai petugas pencacah, memilih petugas yang berpendidikan minimal SLTA agar lebih mudah dalam memberikan pelatihan dan berusaha melakukan komunikasi informal dengan instansi yang terkait dalam mengatasi kurangnya koordinasi.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut: pertama, pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan seharusnya didasarkan pada kajian yang matang, tidak terburu-buru dan adanya perencanaan dan desain yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

Kedua, perlu dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang BLT sebagai payung hukum pelaksanaan program BLT di daerah agar lebih mengoptimalkan peran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan program BLT-PKPS-BBM di Kabupaten Labuhanbatu terutama dalam rangka pelaksanaan program lanjutan BLT pada tahun 2007.

Ketiga, dalam rangka memperbaiki sistem koordinasi dan komunikasi, semua dokumen yang dikeluarkan pemerintah pusat berkenaan dengan program BLT harus dipastikan diterima oleh setiap Pemda Kabupaten/Kota. Rapat koordinasi antara instansi yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan program dana BLT hendaknya dilaksanakan secara rutin yang diprakarsai oleh Bupati Labuhanbatu sehingga masing-masing instansi terkait tidak lagi terkesan berjalan sendiri-diri dalam melaksanakan tugasnya dan memudahkan dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui di lapangan.

Keempat, hasil pendataan rumah tangga penerima BLT termasuk hasil pendataan susulan, perlu dipublikasikan di tempat umum terutama di tingkat RT dan RW agar lebih

transparan. Variabel kriteria miskin perlu dikaji ulang lagi karena mengandung kerancuan dan tidak dapat diterapkan untuk setiap daerah.

Kelima, perlu penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran program, misalnya terhadap pemalsuan informasi dan pungutan terhadap penerima BLT. Pemberian sanksi dan pemberitaannya akan memberikan efek jera terhadap anggota masyarakat dan aparat lain.

Keenam, pemberian bantuan dalam menanggulangi kemiskinan hendaknya memberikan dampak pada peningkatan kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pemberian usaha mandiri baik secara kelompok maupun individu yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara berkesinambungan.

Ketujuh, sosialisasi program BLT kepada masyarakat dapat dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan yang ada di masing-masing daerah seperti organisasi pengajian, organisasi perwiridan, dan organisasi pemuda.

REFERENSI

- Abdullah dan Ridwan S. 1987. *Sistem Administrasi Keuangan*, Jakarta: Penerbit Karunika Universitas Terbuka.
- Gibson JLL, M Luanceich, dan JH Donnley. 1984. *Organization Method (diterjemahkan oleh Djoeban Wahid)*. Bandung: Erlangga.
- Handyaningrat S. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Handoko TH. 1993. *Berbagai Isu dalam Penelitian Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: JEBl.
- Institut Bank Dunia. 2006. *Memberikan Bantuan Uang Tunai: Perancangan dan Pelaksanaan Program-Program Transfer Sosial*, <http://www.worldbank.org/safetynets>.
- Larasati E. et al. 1994. *Keuangan Negara*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Manullang M. 1986. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Matindas R. 2002. *Manajemen SDM Lewat Konsep A.K.U (Ambisi, Kenyataan dan Usaha)*, Jakarta: Grafitipers.
- Nasution S. 1996. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: UGM Press.
- Nazir M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 1995. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Ilhami Jaya.
- Sevilla et al. 1993. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: UNI Press.
- Singarimbun M. & Sofian E. 1989. *Metodologi Penelitian Surveoy*. Jakarta: LP3ES.
- Steers RM. 1985. *Efektivitas Organisasi (Terjemahan Magdalena Jamin)*. Jakarta: Erlangga.
- Suparmoko. 1986. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Syamsi I. 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- The Liang Gie. 1988. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.